

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 106
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN SECARA
ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

TESIS

UNIVERSITAS ANDALAS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Magister
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas*

OLEH

RATIH

2120841002

Dibimbing Oleh:

1. **Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc, Sc**
2. **Dr. Roni Ekha Putera, M.PA**



UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

ABSTRAK

Kemudahan dalam melakukan pelayanan publik, didorong oleh *E-Government* guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa tahun belakangan, upaya penerapan *E-Government* ke arah yang lebih baik sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam lingkup kementerian, lembaga, pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Di Kota Padang penerapan *E-Government* telah dilakukan, yaitu salah satunya dalam penyelenggaraan kebijakan penyelenggaraan perizinan secara elektronik di DPMPTSP Kota Padang.

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Walikota Padang Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penyelenggaraan kegiatan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kebijakan penyelenggaraan perizinan secara elektronik di DPMPTSP Kota Padang belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapatnya faktor penghambat dari keberhasilan kebijakan. Faktor pertama yaitu ukuran kebijakan yang belum terukur dengan baik. Faktor yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya yang masih terbatas, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Faktor ketiga yaitu dukungan sosial masyarakat yang masih kurang, dikarenakan masyarakat masih terbiasa untuk mengurus perizinan secara langsung. Faktor keempat yaitu belum maksimalnya dukungan politik yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang dalam memberikan anggaran yang lebih besar kepada DPMPTSP Kota Padang.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, DPMPTSP Kota Padang, Penyelenggaraan Perizinan Secara Elektronik



ABSTRACT

Ease of providing public services, driven by the E-Government to improve the quality of public services. In recent years, efforts to implement E-Government in a better direction are being actively carried out by the central government and local governments within the scope of ministries, institutions, non-ministerial governments, provincial governments, city governments, and district governments. In the City of Padang, the implementation of E-Government has been carried out, one of which is in the implementation of an electronic licensing implementation policy at the Padang City DPMPTSP.

The purpose of the study is to describe and analyze the implementation and performance of the Padang Mayor Regulation Number 106 of 2020 concerning the Implementation of Electronic Licensing at the Investment Office and One Stop Integrated Services. This study was analyzed using the theory of Van Meter and Van Horn which consists of six variables, namely standards and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, communication between organizations and the implementation of activities, attitudes or tendencies of implementers, and social, economic, and political conditions. The method used is a qualitative approach with a descriptive type.

The results of the study indicate that the performance of the electronic licensing implementation policy at the Padang City DPMPTSP has not gone well, because there are still inhibiting factors to the success of the policy. The first factor is the size of the policy which has not been measured properly. The second factor is the limited availability of resources, both human resources and financial resources. The third factor is the lack of community social support because people are still used to taking care of permits directly. The fourth factor is the lack of political support provided by the Padang City government in providing a larger budget to the Padang City DPMPTSP.

Keywords: Policy implementation, Padang City DPMPTSP, Electronic licensing

